

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Analisis Situasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan digital sejatinya bertujuan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan umum. Rumusan tujuan kesejahteraan umum telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang memuat pernyataan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan tersebut, dalam upaya mencapai kesejahteraan umum dapat diupayakan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya

Kementrian dalam Negeri atau Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil menginstruksikan agar semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan via online. Himbauan tersebut disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 443.1/2978/Dukcapil per 16 Maret 2020 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi covid19 berakhir. Berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi beberapa tahun terakhir ditandai dengan semakin luasnya jaringan internet di seluruh dunia. Pengguna internet di dunia mengalami peningkatan yang signifikan. Internet berkembang semakin pesat karena mudah digunakan dalam pencarian berbagai jenis informasi serta mampu memfasilitasi komunikasi dengan cepat. Karena tuntutan yang harus transparan dan akuntabel, pemerintah didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi internet dalam penerapan pelayanan publik. Dengan begitu, muncullah saat ini istilah e-government atau elektronik government yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Akta kelahiran sebagai tanda bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang wajib dimiliki oleh setiap penduduk NKRI. Tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan akta kelahiran yang dimiliki bisa hilang, rusak, ataupun karena beberapa alasan pribadi seorang individu tidak dapat memiliki akta kelahiran. Dalam hal ini sebagai salah satu bentuk kesadaran dalam memiliki dokumen administrasi kependudukan maka perlu dilakukan pengajuan ulang untuk menerbitkan akta kelahiran lagi atau penerbitan kutipan kedua akta kelahiran. Kemudahan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dapat dirasakan masyarakat Kota Surabaya dengan adanya aplikasi *Klampid New Generation*. Setelah masyarakat Kelurahan Dupak merasakan manfaat kemudahan inovasi ini maka tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya administrasi kependudukan juga akan semakin meningkat serta inovasi-inovasi Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan juga akan berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat Dispendukcapil merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pencatatan peristiwa kependudukan berdasarkan dengan data penduduk yang akurat dan faktual sehingga menjamin validnya data yang masuk dalam database kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, dari pengelolaan tersebut akan menghasilkan sebuah dokumen kependudukan yang saat ini kita ketahui sebagai KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KIA (Kartu Identitas Anak), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan lain-lain.

1.3 Rencana Program

Dalam implementasinya Aplikasi Klampid New Generation (KNG) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KIA (Kartu Identitas Anak), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan lain-lain, yang diciptakan Dengan adanya KNG yang bisa diakses oleh petugas pelayanan di setiap Kelurahan, Kecamatan, bahkan dalam lingkup terkecil RT dan Kepala Keluarga. KNG merupakan salah satu bentuk dari pelayanan secara online yang diciptakan untuk optimalisasi pelayanan kependudukan di Kota Surabaya khususnya Kelurahan Dupak. Aplikasi KNG memiliki banyak opsi permohonan administrasi kependudukan yang dapat diajukan oleh para pengguna seperti, KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KIA (Kartu Identitas Anak), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan lain-lain. Padatnya penduduk Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk terus berinovasi menciptakan sebuah sistem yang dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.